

Handouts 2

KEBIJAKAN NASIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SAMSURI

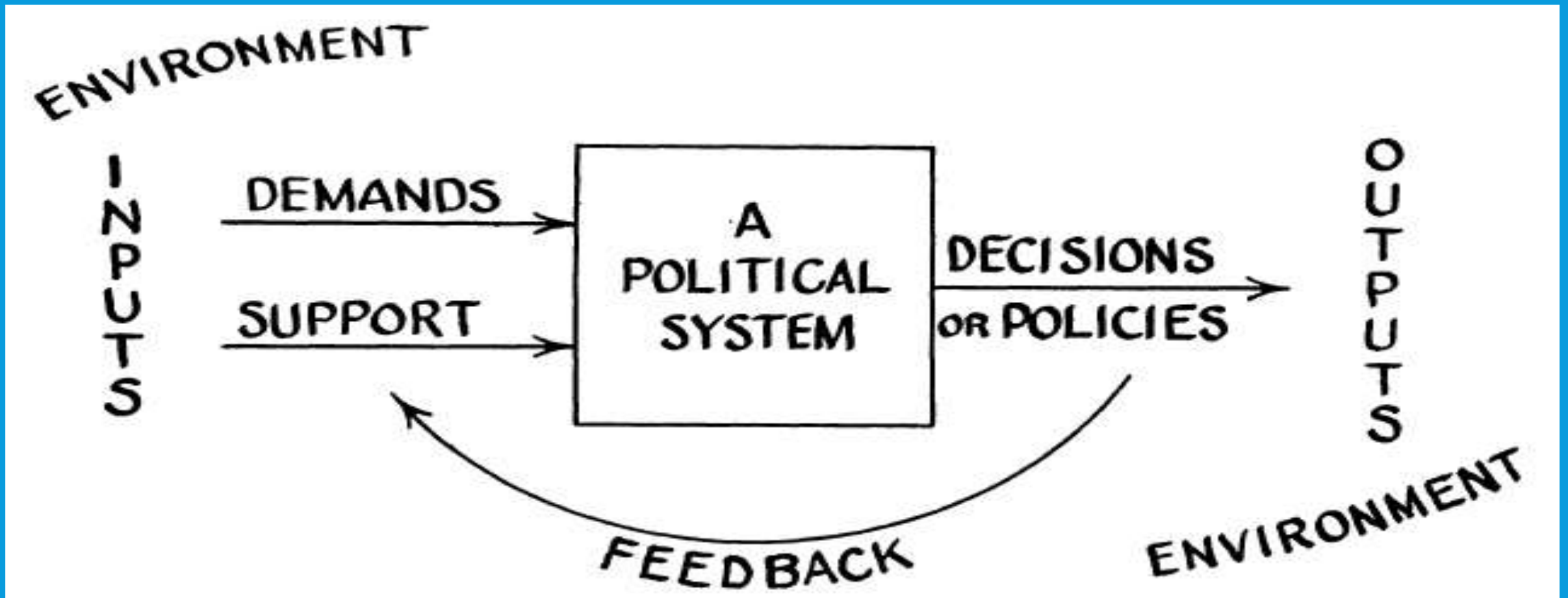
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KEBIJAKAN NASIONAL PENDIDIKAN

- Sebuah KEBIJAKAN NASIONAL PENDIDIKAN merupakan produk kompromi antara kepentingan akademik dan kepentingan politik pendidikan, di mana dalam bahasa Margaret S. Archer (1985: 39) politik pendidikan merupakan "...the attempts (conscious and organized to some degree) to influence the inputs, process and outputs of education, wheter by legislation, pressure group or union action, experimentation, private investment, local transaction, private investment, local transaction, internal innovation or propaganda."
- Keberhasilan Politik pendidikan akan mempergunakan domain-domain yang dikenal dalam ilmu politik seperti : kekuasaan (*power*), pengaruh (*influence*), konflik, dan alokasi nilai-nilai otoritatif (*authoritative allocation of values*) (Kenneth K. Wong, 1995: 21) .

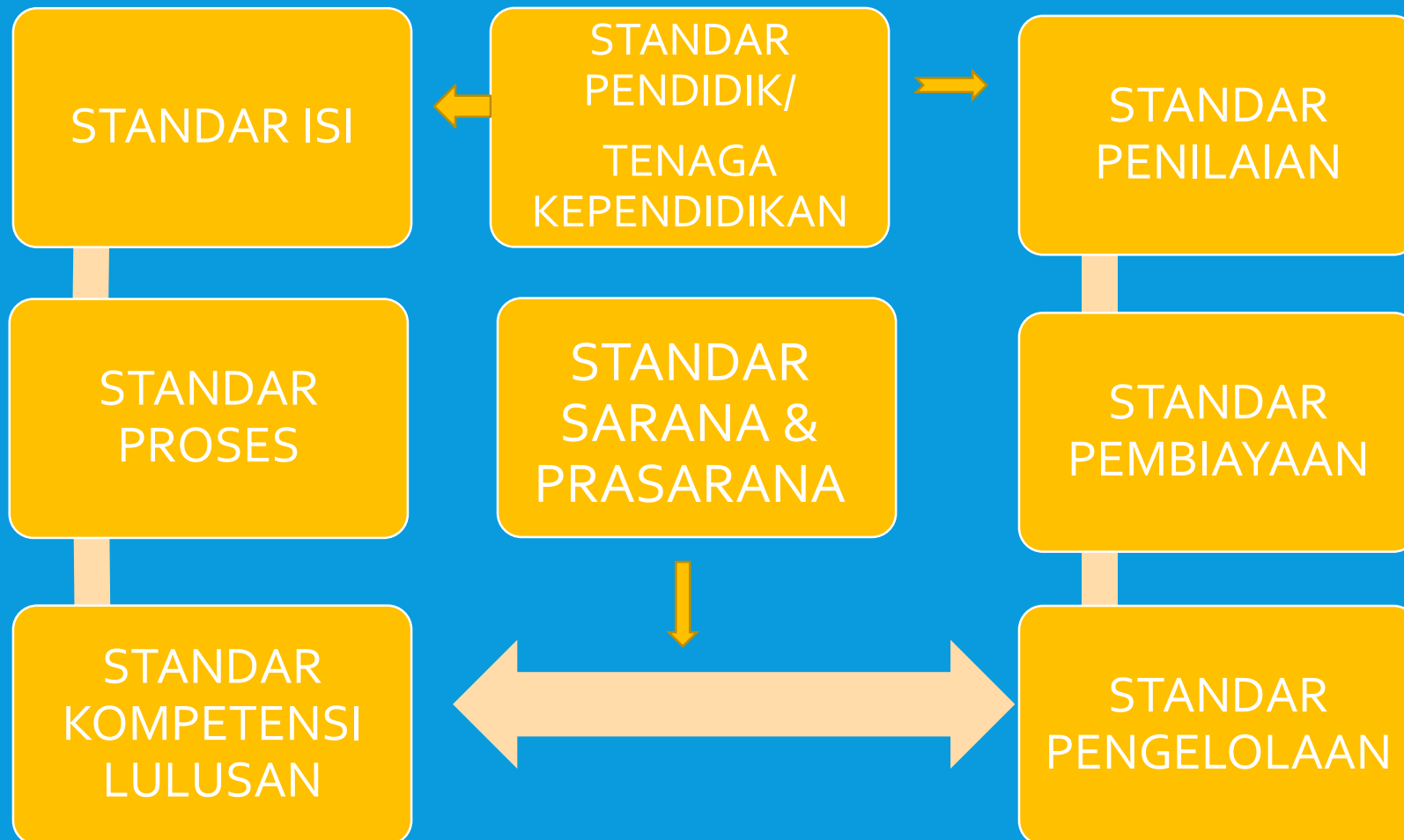
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (1)

SISTEM POLITIK



SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (2)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



NOMENKLATUR PKN DALAM SISDIKNAS

- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN MORAL
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEBANGSAAN
- PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK
- PKN SEBAGAI

RAGAM KAJIAN PKN DALAM SEJUMLAH NOMENKLATUR

<i>Country</i>	<i>Terminology</i>	<i>Approach</i>	<i>Hours per week</i>
New Zealand	Social studies	Statutory core Integrated	Not specified
Singapore	Civics and moral education	Statutory core Integrated and specific	2 × 30 minutes lessons
Spain	Civics linked to history, geography and social sciences	Non-statutory Separate and integrated	3 hours per week
Sweden	Social sciences including history, geography and social studies	Non-core Integrated	885 hours over 9 years of compulsory schooling
Switzerland	Social studies	Non-statutory Integrated	Not specified
USA	Social studies including civics and government	Statutory core Separate and integrated	Time specified per week varies among states

TUJUAN PKN DALAM SISDIKNAS

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006, pp. 272, 280, 287).

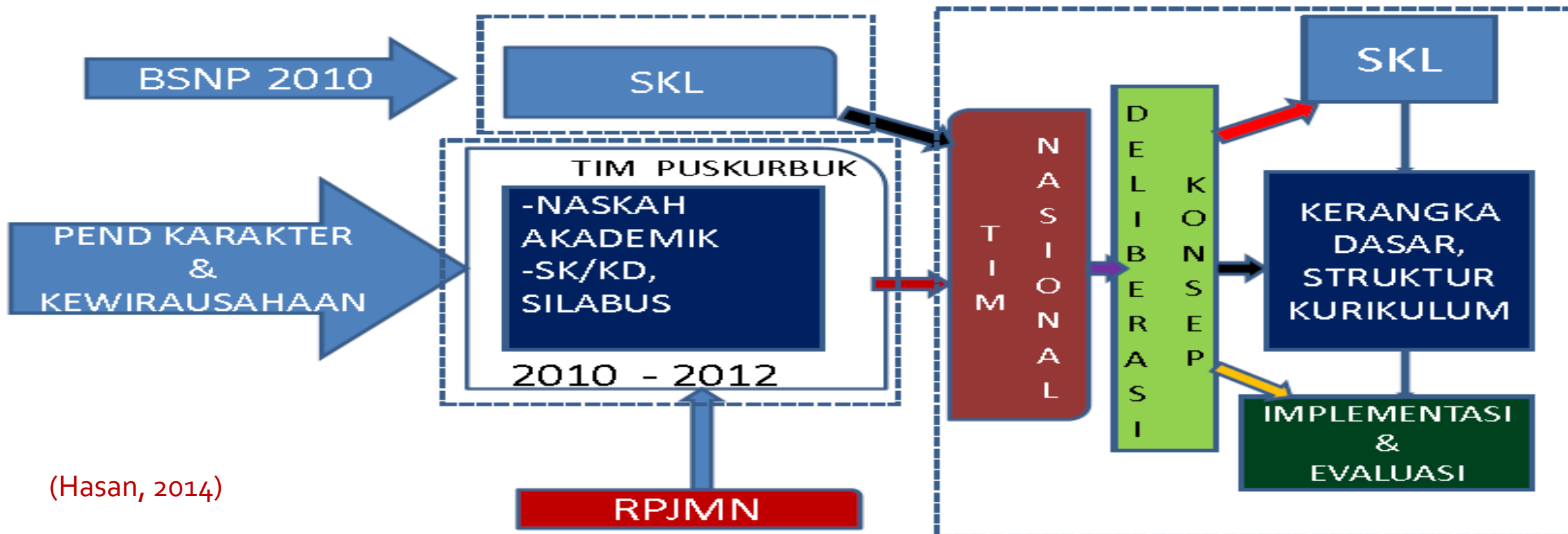
PEMBUAT KEBIJAKAN PKN DALAM SISDIKNAS (KASUS INDONESIA – K₁₃)



(Hasan, 2014)

PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL (KASUS INDONESIA – K13)

PERKEMBANGAN KURIKULUM 2013



(Hasan, 2014)